

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN WISATA JAI-
JAI RAOK DESA PADANG TANGGUNG KECAMATAN PANGEAN
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau**

**RAHMA DANTI
NPM : 187310457**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU**

2022

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PESETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Rahma Danti
NPM : 187310457
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Wisata Jai-Jai Raok Desa Padang Tanggung Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak dapat disetujui untuk diseminarkan.

Pekanbaru, 16 Agustus 2022

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Pembimbing

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH, M.Hum

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Wisata Jai-Jai Raok Desa Padang Tanggung Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi”**.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas segala dukungan, bantuan dan bimbingan dari beberapa pihak selama proses studi dan juga selama proses penyusunan skripsi ini selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCI., Selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau.

4. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH, M.Hum selaku Pembimbing yang telah meluangkan dan memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan Staf dari Fakultas Ilmu sosial dan Pemerintahan Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis menyelesaikan Mata Kuliah, Administrasi dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu kepala Tata Usaha beserta seluruh staff pada fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang senantiasa memberikan bantuan administrasi kepada penulis sehingga penulis dapat melaksanakan perkuliahan dengan sebagaimana mestinya.
7. Terkhusus dan istimewa ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua penulis. Bapak Herjon dan Ibu Poni Putri Dewi, dengan pengertian dan kesabaran senantiasa mendoakan, memberi semangat dan dukungan serta bantuan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Kepada seluruh teman-teman yang tidak bisa saya sebut satu persatu saya mengucapkan terima kasih atas semua bantuan yang diberikan selama penulisan skripsi ini berlangsung.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih jauh dari kesempurnaan. Masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan baik dari segi isi maupun penulisan. Hal ini keterbatasan kemampuan dan cakrawala berpikir serta keterbatasan waktu dan kesempatan. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengharapkan saran yang bersifat membangun dari Bapak/Ibu Dosen

selaku pembimbing dan penguji. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada para pembaca.

Pekanbaru, 16 Agustus 2022

Penulis

Rahma Danti



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
SURAT PERNYATAAN	ix
ABSTRAK	x
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Kegunaan Penelitian	12
STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	13
A. Studi Kepustakaan	13
2.1. Teori Ilmu Pemerintahan	13
2.2 Teori Pemerintahan.....	15
2.3 Teori Pemerintahan Desa	18
2.4 Teori Peran	20
2.5 Teori Pengelolaan	23
2.6 Teori Wisata	25
B. Penelitian Terdahulu	26
C. Kerangka Pikir	28
D. Konsep Operasioal	28
E. Operasional Variabel	30
METODE PENELITIAN	32
3.1 Tipe Penelitian	32
3.2 Lokasi Penelitian	32
3.3 Informan Penelitian	32
3.4 Jenis dan Sumber Data	33

3.5 Teknik Pengumpulan Data	34
3.7 Teknik Analisis Data	35
3.8 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian	36
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	37
4.1 Kondisi Desa Padang Tanggung	37
4.2 Sejarah Desa	37
4.3 Struktur Organisasi Pemerintah Desa	39
4.4 Demografi	40
4.5 Keadaan Sosial	40
4.6 Keadaan Ekonomi	41
4.6 Kondisi Pemerintahan Desa	41
4.6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.....	42
HASIL DAN PEMBAHASAN	44
5.1 Identitas Informan	44
5.2 Hasil Analisis dan Pembahasan Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Wisata Jai-Jai Raok Desa Padang Tanggung Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi	46
5.3 Faktor Penghambat Pembahasan Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Wisata Jai-Jai Raok Desa Padang Tanggung Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi	57
KESIMPULAN DAN SARAN	59
6.1 Kesimpulan	59
6.2 Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	64

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Nama Objek Wisata Kabupaten Kuantan Singingi	8
Tabel 1.2 Jumlah Kunjungan Wisata Jai-Jai Raok Di Desa Padang Tanggung Kecamatan Pangean.....	9
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	26
Tabel 2.2 Operasional Variabel	30
Tabel 3.4.1 Informan Penelitian	33
Tabel 3.8.1 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian.....	36
Tabel 4.4 Kepala Desa Padang Tanggung Dari Periode Ke Periode	38
Tabel 5.1 Demografi Desa Padang Tanggung.....	40
Tabel 5.2 Keadaan Sosial Desa Padang Tanggung.....	40
Tabel 5.2 Keadaan Ekonomi Desa Padang Tanggung.....	41
Tabel 5.4 Kondisi Pemerintah Desa Padang Tanggung	41
Tabel 5.5 Informan Menurut Jenis Kelamin.....	44
Tabel 5.5 Informan Berdasarkan Pendidikan.....	45
Tabel 5.5 Informan Berdasarkan Usia.....	45
Tabel 5.5 Informan Berdasarkan Jabatan.....	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pikir	28
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Padng Tanggung.....	39



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rahma Danti
NPM : 187310457
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Wisata Jai-Jai Raok Desa Padang Tanggung Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi

Atas naskah yang didaftarkan pada Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwasanya, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrative, akademik, dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila kemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan butir 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 16 Agustus 2022

Rahma Danti

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN WISATA JAI-
JAI RAOK DESA PADANG TANGGUNG KECAMATAN PANGEAN
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

ABSTRAK

Rahma Danti

187310457

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam pengelolaan wisata jai-jai raok desa Padang Tanggung Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singing. Adapun permasalahan dalam Skripsi ini yaitu Belum dikelola secara baik dan tidak adanya inisiator perubahan baik dari pemerintah desa maupun Swadaya masyarakat serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kerjasama dalam pengelolaan objek wisata. Serta Kurangnya daya tarik terhadap objek wisata ini sendiri karena kurangnya pembangunan ataupun pengembangan Adapun jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif yang mana penelitian ini mengeksplor dan menganalisa untuk memberikan arti dan makna dalam pemecahan masalah. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.. Kesimpulan tidak adanya inisiator perubahan baik dari pemerintah desa maupun Swadaya masyarakat ditandai dengan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kerjasama dalam pengelolaan objek wisata. Serta kurangnya daya tarik terhadap objek wisata ini sendiri karena kurangnya pembangunan ataupun pengembangan. Faktor penghambat pengelolaan wisata jai-jai raok diantaranya hanya menyediakan insfratraktur (tidak hanya bentuk fisik), namun tidak dilakukan pengelolaan berkelanjutan ataupun perawatan infrastruktur. Saran dari penelitian ini adalah infrasutuktur secara fisiknya yang sedang tidak mendapatkan perawatan yang baik, agar dilakukan evaluasi secara seksama dengan pengelola objek wisata sehingga objek wisata dapat melakukan promosi umum ke luar desa, kecamatan bahkan kabupaten dan mengoptimalkan kerjasama antara Pemerintah Desa dan Pengelola objek wisata ataupun dengan masyarakat setempat agar objek wisata lebih baik kedepannya.

Kata Kunci: Peran Pemerintah Desa, Pengelolaan Objek Wisata

**THE ROLE OF THE VILLAGE GOVERNMENT IN JAI-JAI RAOK
TOURISM MANAGEMENT PADANG TANGGUNG VILLAGE PANGEAN
DISTRICT KUANTAN SINGINGI REGENCY**

ABSTRACT

Rahma Danti

187310457

The purpose of this study was to determine the role of the village government in the management of jai-jai raok tourism in the village of Padang Tanggung, Pangean District, Kuantan Singing Regency. The problems in this thesis are that it has not been managed properly and there are no change initiators from both the village government and non-governmental organizations and the low public awareness of cooperation in the management of tourism objects. And the lack of attraction to this tourist attraction itself because of the lack of development or development. The type of research in writing this thesis is a qualitative descriptive research method in which this research explores and analyzes to provide meaning and meaning in problem solving. The data collected is in the form of words, pictures, and not numbers. Thus, an explanation and description of the research topic can be obtained in accordance with the research title. The conclusion is that there is no change initiator from either the village government or non-governmental organizations which is marked by the low public awareness of cooperation in the management of tourism objects. The inhibiting factors for the management of Jai-jai raok tourism include only providing infrastructure (not only physical form), but not carrying out sustainable management or infrastructure maintenance. Suggestions from this research are the physical infrastructure that is not getting good care, so that a careful evaluation is carried out with the tourism object manager so that the tourism object can carry out general promotions outside the village, sub-district and even district and optimize cooperation between the Village Government and the manager of the tourist attraction or with the local community for a better tourist attraction in the future.

Keywords: *Role of Village Government, Management of Tourism Objects*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan dilaksanakan kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam kehidupan bernegara, pemerintahan sangat dibutuhkan untuk mengatur rakyat, mengayomi rakyat, serta memenuhi kebutuhan rakyat karena sifat hakikat negara memiliki sifat memaksa, monopoli, dan mencakup keduanya. Dengan adanya pemerintahan, semua wilayah dan batasbatasnya dapat dikontrol dan diawasi serta dapat diatur dengan mudah. Setiap wilayah memiliki pemerintahan dan perangkat pemerintahannya sendiri mulai dari desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat. Dalam menjalankan perannya, Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya yang dikenal sebagai otonomi daerah, dengan dua asas penyelenggaraan pemerintah daerah yaitu asas otonomi daerah dan tugas pembantu. Pengaturan mengenai pemerintah daerah telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memandatkan kepada pemerintah agar mengimplementasikan otonomi daerah, dimana melalui asas desentralisasi. Otonomi yang memberikan kewenangan sepenuhnya kepada daerah untuk menjalankan pemerintahan yang mandiri dan kreatif dalam meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat di daerah. Dalam hal ini konsep otonomi daerah

ini terkait penghargaan terhadap kekhasan daerah, maka pemerintah memberikan hak otonomi terhadap desa.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan dalam Pasal 1 yang dimaksud dengan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di Pasal 1 ayat 3, Pasal 23 sampai dengan Pasal 25 dijelaskan Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa yang mana Pemerintah Desa tersebut adalah seorang Kepala Desa atau sebutan lainnya sesuai dengan kekhasan daerahnya masing-masing. Kepala Desa tersebut dibantu oleh perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas: kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan partisipatif.

Kawasan perdesaan Disamping itu tersirat dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 bahwa desa memiliki empat jenis kewenangan yaitu kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan Kewenangan lain yang ditugaskan Pemerintah dan Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kewenangan desa sebenarnya tidak hanya mencakup empat kewenangan saja. Ada satu jenis kewenangan lain yang dimiliki oleh desa, yaitu kewenangan atributif yang tidak tersurat dalam UU. Kewenangan tersebut memberikan landasan bagi desa untuk mengelola dan mengatur sumber daya alam skala desa.

Desa merupakan wilayah terendah dalam ketatanegaran di Indonesia. Setelah lahirnya Undang-undang desa, desa diharapkan dapat menjadi mandiri secara sosial, budaya, ekonomi dan politik. Dengan adanya salah satu misi pemerintah pada saat ini yaitu untuk membangun daerah pedesaan yang dapat dicapai melalui sebuah pemberdayaan masyarakat dengan tujuan yang dapat dicapai melalui sebuah pemberdayaan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha yang ada, terpenuhinya sarana dan fasilitas untuk mendukung peningkatan ekonomi desa, membangun dan memperkuat institusi yang mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan sumber daya manusia sebagai dasar pertumbuhan ekonomi desa.

Kemajuan ekonomi nasional hanya akan tercapai jika terdapat iklim perekonomian yang baik di tingkat provinsi. Kemajuan ekonomi di tingkat provinsi akan tercapai jika kabupaten memiliki kegiatan ekonomi yang baik. Kemajuan ekonomi sebuah kabupaten dapat tercapai karena adanya sumbangsih dari ekonomi pedesaan yang kuat yang berhimbas pada kesejahteraan masyarakat luas. Hal ini akan menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang baik untuk diterapkan di semua tingkat pembangunan dan keputusan berdasarkan kebutuhan nyata dari masyarakat.

Pemerintah Desa adalah suatu lembaga desa yang dikelola langsung oleh pemerintahan desa dan masyarakat dalam upaya meningkatkan perekonomian desa dan masyarakat dalam upaya meningkatkan perekonomian desa dan potensi desa. Pemerintah Desa merupakan instrument pemberdayaan ekonomi local dengan berbagai ragam jenis usaha sesuai dengan potensi yang dimiliki desanya.

Keberadaan Pemerintah Desa juga membawa dampak yang signifikan terhadap peningkatan sumber pendapatan asli desa (PAD) yang memungkinkan desa untuk mampu melakukan sebuah pembangunan dan juga untuk peningkatan kesejahteraan secara lebih optimal. Melalui Pemerintah Desa ini nanti pendapatan desa bisa jadi lebih terukur dan menghasilkan, guna mendukung tambahan sumber pendapatan lainnya berupa PAD untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Wisata Pantai Jai Jai Raok ini sebenarnya sudah ada sejak beberapa tahun yang lalu. Namun belakangan ini pemerintah setempat lebih memperhatikan infrastruktur yang ada dan melakukan beberapa pembaharuan serta pembangunan di pantai Jai Jai Raok ini. Alhasil pada akhir tahun 2020 yang lalu objek wisata ini mulai dikenal oleh masyarakat ramai dan viral di media sosial setempat. Banyak masyarakat yang berasal dari luar kecamatan pangean, terutama sekali anak muda yang datang ke lokasi wisata untuk merasakan sendiri sensasi pantai di pinggir sungai batang kuantan ini. Pendirian Pemerintah Desa adalah merupakan sebuah perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif pada desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, sustainable. Dinyatakan dalam Undang-undang No 6 Tahun 2014 bahwa Pemerintah Desa dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa setempat. Dimana, yang dimaksud dengan kebutuhan dan potensi desa adalah sebagai berikut :

1. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
2. Tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal;
3. Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai asset penggerak perekonomian masyarakat;

4. Adanya unit yang merupakan kegiatan ekonomi masyarakat pada Pemerintah Desa juga didirikan untuk mendorong berkembangnya system usaha kapitalis pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat

Pemerintah Desa merupakan sebuah pilar kegiatan perekonomian di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). Pemerintah Desa adalah sebagai lembaga sosial yang berpihak kepada kepentingan seluruh masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan social. Sedangkan Pemerintah Desa sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal (barang dan jasa). Eksistensi desa mendapat perhatian yang serius dari pemerintah pusat dengan lahirnya kebijakan-kebijakan terkait dengan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan dengan cara menghimpun dan melembagakan kegiatan ekonomi masyarakat.

Oleh karena itu pemerintah menerapkan pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa yaitu Pemerintah Desa sebagai salah satu program andalan dalam meningkatkan kemandirian perekonomian desa.

Pengelolaan sektor pariwisata merupakan suatu tindakan yang logis, mengingat dampak positif yang ditimbulkan diantaranya semakin meluasnya kesempatan usaha, baik hotel, biro perjalanan, toko cinderamata serta meningkatnya pendapatan masyarakat dan mendorong terpeliharanya keamanan dan

ketertiban walupun sebenarnya juga ada hal-hal yang berdampak negatif. Peranan pemerintah daerah dalam mengelola objek wisata memang dinilai masih tidak tertata, karena dalam pelaksanaan dapat dilihat infrastruktur dan sarana- prasarana yang belum sepenuhnya mendukung.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan, yang dimaksud dengan:

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
2. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Dengan adanya objek daya tarik wisata yang kuat maka potensi ini menjadi magnet untuk menarik para wisatawan Muljadi (2012:89).

Pengembangan kepariwisataaan haruslah memiliki tiga aspek penting produk pariwisata, yaitu:

1. Atraksi Merupakan pusat dari industri pariwisata. Maksudnya atraksi mampu menarik wisatawan yang ingin mengunjunginya. Biasanya mereka tertarik pada suatu lokasi karena ciri- ciri khas tertentu. Ciri-ciri khas yang menarik wisatawan adalah :

- a) Keindahan alam.
 - b) Iklim dan cuaca.
 - c) Kebudayaan.
2. Amenitas Merupakan berbagai fasilitas penunjang para wisatawan untuk berwisata ke suatu daerah tujuan wisata dengan kenyamanan dan kepuasan tersendiri. Hal tersebut antara lain lain akomodasi yang nyaman, restoran, bar, layanan informasi, pramuwisata, sikap masyarakat setempat, keamanan dan lainlain.
 3. Aksesibilitas Berhubungan dengan segala jenis transportasi, jarak atau kemudahan pencapaian suatu objek wisata. Serta unsur pendukung lainnya (pelaku industri pariwisata, masyarakat dan institusi pengembangan) yang membentuk sistem yang sinergis dalam menciptakan motivasi kunjungan wisatawan.

Salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah kemampuan dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan objek wisata secara efektif dan efisien. Dalam rangka proses pengelolaan di atas maka salah satu tugas penting pemerintah adalah berperan membangun serta mempromosikan sumber daya pariwisata yang. Oleh karena itu sangat perlu adanya pengelolaan lingkungan yang terencana dari pemerintah untuk keberlanjutan pariwisata kedepannya.

Table I.1 Nama Objek Wisata Kabupaten Kuantan Singingi

No	Nama Objek Wisata	Alamat	Jarak Tempuh Dari	
			Ibukota Provinsi(KM) Kurang Lebih	Ibukota Kabupaten (KM) Kurang Lebih
1.	Pacu Jalur Tepian Narosa (Sejarah)	Kec.Kuantan Tengah, Teluk Kuantan	166	0,5
2.	Pemandian Air Panas (Alam)	Kec. Hulu Kuantan, Desa Sei. Pinang	200	35
3.	Air Terjun Guruh Gemurai (Alam)	Kec. Kuantan Mudik, Desa Kasang	206	40
4.	Air Terjun Hulu Lembu (Alam)	Kec. Singingi, Desa Muara Lembu	124	40
5.	Tempat Pemandian Tabijo Sei. Tepi (Alam)	Kec. Singingi Hilir, Kec. Desa Petai	111	55
6.	Panorama Hutan Lindung (Alam)	Kec. Sentajo Raya, Desa Koto Sentajo	173	7
7.	Danau Rawang Udang (alam)	Kec. Benai	178	12
8.	Danau Panjang (Alam)	Inuman	214	48
9.	Danau Pisang Berebus (Alam)	Kec. Gunung Toar, Desa Pinang Rebus	177	12
10.	Sungai Jernih (Alam)	Kec. Pucuk Rantau, Desa Ibul	230	50
11.	Jai-Jai Raok (Alam)	Kec. Pangean, Desa Padang Tanggung	185,5	23,6

Sumber :Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi,2021

Di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau yaitu tepatnya Kecamatan Pangean memiliki 14 (empat belas) desa yang sebagian besar wilayahnya memiliki wisata alam yang belum dikelola dengan optimal di desa Padang Tanggung Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Desa Padang Tanggung memiliki destinasi wisata alam yang berupa pantai yang dikelola oleh Pemerintah Desa. Pemerintahan Desa Padang Tanggung ini mewujudkan kesejahteraan serta pemberdayaan Masyarakat Desa Padang Tanggung Melalui Pengembangan

usaha pada sector wisata Jai-Jai Raok, mengembangkan perekonomian desa, mengembangkan usaha masyarakat desa dalam pengelolaan potensi desa, meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa, mengelola dan mengembangkan usaha ekonomi perdesaan.

Table I.2 Jumlah Kunjungan Wisata Jai-Jai Raok Di Desa Padang Tanggung Kecamatan Pangean.

No	Nama Wisata	Per-Tahun	Jumlah
1.	Jai-Jai Raok	2019	750 orang
		2020	647 orang
		2021	437 orang

Sumber : *Olahan Penulis, 2022*

Pemerintah Desa Padang Tanggung telah membuat Fasilitas wisata yang tersedia di wisata Jai-Jai Raok diantaranya:

1. Istana balon
2. Odong-odong air
3. Banana boat
4. Mainan motor anak-anak
5. Mandi Bola

Berdasarkan pendapat peneliti kawasan pantai jai jai raok mempunyai potensi yang sangat besar dan mempunyai jenis kegiatan wisata di tengah kawasan sungai, perlunya perhatian lebih untuk meningkatkan serta mempopulerkan kawasan wisata ini untuk mendatangkan manfaat bagi masyarakat sekitar, penelitian ini dilaksanakan dengan harapan bisa membuat suatu masukan, harapan dan manfaat yang positif untuk keberlangsungan wisata pantai jai jai raok yang berda di tepi sungai ini serta memberikan manfaat untuk stakeholder agar bisa

meningkatkan kawasan objek wisata pantai jai jai raok ke arah yang lebih baik dan bisa menjaga kawasan alam agar berkelanjutan.

Obyek wisata Jai Jai Raok menjadi alternatif untuk dikunjungi guna mengisi hari libur. Seperti halnya obyek wisata desa, Pantai Jai Jai Raok Padang Tanggung Pangean. Warga dari berbagai luar daerah pun berdatangan mengunjunginya. Ada warga dari kiliran jao Sumatera, Jambi, Peranap dan Pelalawan. Mereka menginjakkan kakinya di pantai yang terhampar di Sungai Kuantan. Setiap hari lokasi Pantai Jai Jai Raok ini ramai dikunjungi.

Obyek wisata Jai Jai Raok ini menjadi alternatif untuk dikunjungi kapan pun oleh pengunjung. Walaupun tempat wisata ini sangatlah ramai pengunjung bahkan dari luar daerah. Walaupun masih banyak kekurangan dalam pengelolaan obyek wisata yang dikelola Pemerintah Desa Padang Tanggung ini, salah satu nya pemerintah desa bujang padang tanggung masih kurang dalam mempromosikan wisata Jai jai Raok di media sosial, dan masih kurang fasilitas dalam melakukan pengembangan wisata Jai jai Raok ini, contoh nya fasilitas lahan parkir yang masih di sekitar rumah-rumah masyarakat. Disinilah peran pemerintah desa dalam melakukan pengembangan wisata yang terdapat di Desa Padang Tanggung.

Camat pangean yang dari awal mendukung, membina dan mendorong promosi obyek wisata ini berharap agar para pengelola dan pemerintahan desa menata dengan baik dan tepat pengelolaan obyek wisata ini. Akibat dijejali parkir kendaraan, rumputnya jadi hancur dan rusak. Apalagi saat ini musim hujan, sudah barang tentu akan akan sangat berpengaruh sekali. Mudah-mudahan bisa menjadi perhatian Pemdes, Pengelolaan dan Petugas Parkir kedepannya.

Seharusnya apa yang telah diraih sekarang ini, hendaknya terus dikembangkan ke depan. Karena butuh kepedulian semua pihak untuk menjaga aset wisata desa ini, harap Camat Pangean. Evaluasi kekurangan yang ada dan disempurnakan. Jangan berpuas diri dengan kondisi saat ini. Diperlukan kerja keras, kerjasama, kreasi dan inovasi agar Jai Jai Raok semakin berkembang.

Dari masalah yang dipaparkan diatas peneliti menemukan beberapa fenomena permasalahan:

1. Belum dikelola secara baik dan tidak adanya inisiator perubahan baik dari pemerintah desa maupun Swadaya masyarakat.
2. Rendahnya Kesadaran masyarakat terhadap kerjasama dalam pengelolaan objek wisata menjadi sebuah factor prnghambat dari pengelolaan objek wisata jai-jai raok.

Berdasarkan dari fenomena yang penulis temukan di lapangan sesuai yang di uraikan diatas, maka penulis tertarik untuk menelitinya lebih lanjut dengan mengangkat: **“Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Wisata Jai- Jai Raok Desa Padang Tanggung Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian penjelasan latar belakang diatas, maka dapat disimpulkan rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: **“Bagaimana Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Sektor Wisata Jai- Jai Raok Desa Padang Tanggung Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi ?”**

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Sektor Wisata Jai- Jai Raok Desa Padang Tanggung Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat pengelolaan wisata Jai- jai raok Desa Padang Tanggung.

1.4 Kegunaan penelitian

1. Kegunaan teoritis, sebagai bahan manfaat penelitian agar dapat mengembangkan teori-teori yang telah ada sehingga memperkaya hasil-hasil ilmu pengetahuan baru dalam pengembangan ilmu pemerintahan.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah desa dalam pengembangan wisata jari-jai raok Desa Padang Tanggung.
 - b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pemerintah desa dalam pengembangan wisata di Desa Padang Tanggung

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Dalam penulisan karya ilmiah diperlukannya sebuah landasan atau pijakan sebagai sebuah pedoman dan acuan berpikir penulis dalam memecahkan masalah pokok. Dalam penelitian ini penulis memaparkan teori- teori yang ada relevansinya dengan judul yang telah penulis buat.

2.1 Teori Ilmu Pemerintahan

Ilmu adalah suatu objek yang ilmiah, dimana memiliki sekelompok prinsip, dalil, rumusan, yang melalui percobaan yang sistematis dilakukan berulang kali, yang telah teruji kebenarannya, prinsip-prinsip, dalil-dalil, rumus- rumus mana dapat diajarkan dan dipelajari (Syafiie, 2016).

Ilmu Pemerintahan merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan setiap orang akan jasa publik dan layanan sipil dalam hubungan pemerintahan (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh orang yang bersangkutan. Hal ini bersangkutan antara birokrasi yang ada di pemerintahan mereka akan memberikan jasa berbentuk pelayanan baik untuk masyarakat maupun layanan sipil, oleh karena itu ilmu pemerintahan sangat perlu di pelajari apabila kita akan menduduki di instansi pemerintahan baik menjadi pemimpin maupun seorang birokrasi di kantor dinas sebagai pelayan masyarakat (Ndraha, 2011).

Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi serta melindungi kebutuhan dan tuntutan setiap orang akan pelayanan publik dan pelayanan sipil dalam hubungan pemerintahan. Pemerintahan itu memiliki dua fungsi dasar yaitu yang pertama fungsi primer atau fungsi pelayanan dan serta fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan. Menurut (Munaf, 2015) Proses pemerintahan dalam suatu Negara sangat bergantung pada bentuk pemerintahan Negara yang bersangkutan sehingga berdampak pada penyusunan dan pelaksanaan Hukum Administrasi Negara pada Negara tersebut.

Ilmu pemerintahan Menurut H.A Brasz (Syafiie, 2005) mengatakan ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga/dinas pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan baik ke dalam maupun keluar terhadap warganya. Suatu pemimpin kepala daerah yang di tugaskan untuk melaksanakan fungsinya juga harus memberikan dampak positif terhadap masyarakat yang sedang di pimpinya karena mereka juga akan menghormati pemimpinnya apabila seluruh hak serta kewajiban masyarakat berjalan dengan baik, sedangkan menurut Musanef ilmu pemerintahan merupakan ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian ke dalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya di wakili oleh dinas itu karena dinas tersebut sebagai tempat pengaduan atau melakukan permohonan untuk masyarakat.

Ilmu pemerintahan juga dapat di sebut sebagai suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan

dengan keserasian ke dalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya di wakili oleh dinas itu karena dinas tersebut sebagai tempat pengaduan atau melakukan permohonan untuk masyarakat.

2.2 Teori Pemerintahan

Syafie (2011;20) pemerintahan berasal dari kata pemerintahan,yang paling sedikit “perintah” tersebut memiliki 4 unsur yaitu,ada 2 pihak yang terkandung ,kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan,dan pihak yang memerintah memiliki wewenang,dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan.

Sedangkan menurut Ndraha (2011;5) pemerintah dalah sebuah sistem multi proses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa publik dan layanan civil.

Musanef (dalam syfiie, 2011;9) ilmu pemerintahan adalah sesuatu ilmuyang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas,berhubungan dengan keserasian kedalam dan hubungan antara dinas dan masyarakat berkepentingannya diwakili oleh dinas tersebut.

Menurut Napitupulu (2012;9) Pemerintahan mengandung arti Lembaga atau organisasi yang menjalankan kekuasaan pemrintahan, sedangkan pemerintahan adalah proses berlangsungnya kegiatan atau perubahan pemerintahan dalam mengatur kekuasaan suatu negara.

Menurut Philipus M. Hadjon (2005: 6), pemerintahan dapat dipahami melalui dua pengertian yaitu “fungsi pemerintahan” dan “organisasi pemerintahan. Pemerintah sebagai sebuah organisasi dapat diartikan sebagai kumpulan organ dari organisasi pemerintahan yang dibebani dengan pelaksanaan tugas pemerintahan.

Istilah pemerintah berasal dari kata “perintah” yang berarti menyuruh melakukan sesuatu sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu Negara (daerah Negara) atau badan tertinggi yang memerintah suatu Negara, seperti kabinet merupakan suatu pemerintah. Sedangkan pemerintahan dalam konsep bahasa Inggris disebut dengan istilah “*government*” yang berasal dari bahasa Latin “*go-bernare, greek kybernan*” yang berarti mengemudikan, atau mengendalikan (Ilmar: 2014).

Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati dan untuk kota adalah walikota, serta di bantu oleh wakilnya. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat. Bersamaan dengan hal itu (Osborne, 2000) mengatakan bahwa pemerintah yang demokrasi lahir untuk melayani warganya dan karena itulah tugas pemerintah adalah mencari cara untuk menyenangkan warganya. Dengan demikian pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai kemajuan Bersama.

Pemerintahan dalam arti sempit hanya meliputi lembaga yang mengurus pelaksanaan roda pemerintahan (disebut eksekutif), lembaga eksekutif adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan, peraturan

yang di buat oleh legislatif. Presiden mejadi kepala negara dan kepala pemerintahan yang menjalankan roda pemerintahan suatu negara. Sedangkan pemerintahan dalam arti luas selain eksekutif termasuk juga lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan serta kebijakan (disebut legislatif) dan yang melaksanakan peradilan (disebut yudikatif) (Syafiie 2005;20). Pemerintahanjuga dapat disebut sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan public dan wajib menyelenggarakan pelayanan sipiluntuk semua melalui hubungan dengan pemerintah, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerianya bila diperlukan, sesuai dengan tuntutan dari pemerintah.

Pemerintahan secara umum adalah orang atau sekelompok orang yang diberikan legitimasi oleh masyarakat untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah, dan dilengkapi oleh alat-alat kelengkapan negara yang berperan membantu pemerintah dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan. Oleh karena itu unsur utama pemerintah tersebut yakni orang atau sekelompok orang yang diberikan legitimasi dalam bentuk kewenangan untuk menjalankan tugas-tugas pemerintah yang di dalamnya terdapat menyelenggarakan pelayanan pemerintahan, pelayanan pembangunan, pelayanan kemasyarakatan dan pemberdayaan sehingga pemerintah memeiliki fungsi dasar yakni pelayanan (Sri, 2014). Terkadang ketika seorang pemimpin yang sudah di percayai oleh masyarakat untuk memimpin suatu daerah terkadang mereka lupa dengan tugas mereka bahkan ada juga yang kecolongan korupsi uang rakyat sehingga tugas yang meeka kerjakan sebagai kepala pemerintah tidak berjalan dengan baik da berpaling ke rana hukum akitab tindakan yang telah di langgar.

2.3 Teori Pemerintahan Desa

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mana memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, serta hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Adapun pengertian secara umum yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Desa adalah kelompok rumah diluar kota yang merupakan sebuah kesatuan. Jadi, kesimpulannya adalah desa ini merupakan suatu wilayah suatu kesatuan masyarakat yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang memiliki system pemerintahan sendiri dan diakui dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa di Indonesia telah mengalami perjalanan yang cukup panjang. Bahkan sebelum republic ini berdiri, desa-desa di Indonesia telah hadir menjadi cikal bakal masyarakat politik dan pemerintahan (Rukayat, 2021). Pada masa itu, desa merupakan kesatuan masyarakat kecil, seperti sebuah rumahtangga besar yang dipimpin oleh anggota keluarga yang paling ditentukan atau dihormati berdasarkan garis keturunan. Pola hubungan dan tingkat komunikasi pada masa itu masih sangat rendah, terutama di daerah pedesaan terpencil dan pedalaman menurut Sumpeno (Dalam Rukayat, 2021:8).

Secara etimologi kata desa ini berasal dari bahasa sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Menurut (Widjaja, 2014) desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki susunan aski berdasarkan

hak asal-usul yang bersifat istimewa. Sementara itu menurut Zakaria mendefinisikan desa sebagai sekumpulan orang yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada di wilayah pimpinan yang dipilih dan ditetapkan sendiri. Dengan kata lain, desa merupakan satuan kelompok masyarakat yang dibentuk berdasarkan dengan kesamaan asal-usul yang didalamnya diatur oleh peraturan-peraturan yang dibuat serta disetujui oleh seluruh anggota yang ada didalamnya.

Hal senada juga dikemukakan oleh (Sutarjo, 2011) yang mengungkapkan bahwasannya desa adalah sebagai sebuah kesatuan hukum dimana bermukim suatu masyarakat yang berkuasa dan masyarakat tersebut mengadakan pemerintahannya sendiri. Dimana unsur-unsur dalam desa ini meliputi :

- a. Daerah (lingkungan geografis);
- b. Penduduk yang meliputi berbagai hal tentang kependudukan seperti jumlah, persebaran, mata pencarian, dan lain-lain;
- c. Tata kehidupan, meliputi segala hal yang menyangkut seluk beluk kehidupan masyarakat desa.

Jadi desa ini merupakan hasil perwujudan geografis, sosial, ekonomi, politik, dan kultural yang terdapat pada suatu daerah serta memiliki hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain. Dari pengertian-pengertian mengenai desa diatas dapat dipahami bahwasannya, desa tidak hanya sekumpulan orang-orang yang diikat dalam suatu hubungan asal-usul yang khas dengan aturan hukum didalamnya, tetapi juga memiliki pemerintahan sendiri untuk mengelola dan menata seluruh elemen yang ada didalam sebuah sistem itu sendiri. Dengan

demikian pula, sejak awal adanya desa telah menunjukkan bahwa desa ini kemandiriannya sebagai sebuah wilayah tentunya memiliki aturan dan pemerintahannya sendiri.

Pemerintahan desa merupakan sebuah unsur penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari unsur pemerintahan desa yang terdiri dari Kepala Desa dan aparatur desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan unsur perwakilan masyarakat desa. Pada posisi ini pemerintah desa beserta dengan BPD memiliki kedudukan sebagai mitra pemerintahan dan pembangunan desa untuk menjalankan roda pemerintahan secara bersama-sama.

2.4 Teori Peran

Menurut Biddle dan Thommas dalam buku sarlito (2011:224). Peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-prilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Biddle dan Thommas juga memberikan istilah dalam teori peran dibagi menjadi empat golongan, yaitu istilah-istilah yang menyangkut:

- a. Orang-orang yang mengambil bagian
- b. Perilaku yang muncul dalam instruksi tersebut
- c. Kedudukan orang-orang dalam perilaku
- d. Kaitan orang dengan perilaku

Peranan adalah suatu perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya, dan seseorang dapat dikatakan jika ia telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dalam masyarakat (Abdulsyani, 2012:94).

Menurut (Soekanto, 2009:231) Peran timbul karena kedudukan seseorang dalam menjalankan perilakunya dan ia tidak bekerja sendiri sebab memiliki lingkungan yang diperlukan untuk berinteraksi. Lingkungan tersebut luas dan beraneka macam serta mempunyai lingkungan yang berlainan. Tetapi peranan yang harus dilakoni secara substansial tidak ada perbedaan. Dengan demikian peranan merupakan kedudukan yang dimiliki seseorang dari setiap perilaku yang diharapkan oleh pihak lain dalam melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan status yang dimilikinya.

Menurut Veithzal Rivai (2004:148) Peranan di artikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu. Selanjutnya menurut Miftha Thoha (2005:10) peranan sebagai suatu rangkaian perilaku yang timbul karena suatu jabatan. Jadi, peran adalah suatu rangkaian kegiatan yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecendrungan untuk hidup berkelompok. Salam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat lainnya. Timbulnya interaksi diantar mereka ada saling ketergantungan. Dengan adanya saling ketergantungan tersebutlah maka suatu peran tersebut akan terbentuk.

Peran yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam kemasyarakatan yaitu (*social position*) merupakan unsur statis yang mana menunjukkan tempat individu pada sebuah organisasi masyarakat, karena ketika kita melihat individu seseorang maka disitulah kita melihat kepribadian sesungguhnya. Peranan lebih banyak menunjuk dalam fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi seseorang

menduduki sebuah posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peran. Peran mencakup kedalam tiga hal yaitu sebagai berikut:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial kemasyarakatan.

Aspek tersebut yaitu penilaian dari perilaku seseorang yang berada di masyarakat terkait dengan posisi dan kedudukannya, konsep-konsep yang dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat sesuai dengan kedudukannya, serta aspek ketiga perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peran dibagi menjadi tiga, yaitu peran aktif, peran partisipatif, dan peran pasif (Soekanto, 2009:242).

1. Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai katifis kelompok, seperti pengurus, pejabat, dsb.
2. Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.
3. Sedangkan peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar member kesempatan kepada fungsi – fungsi lain dalam kelompok dapat berjalan baik.

Menurut Soerjono Soekanto Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial.

Menurut J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (2010:160) peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah sebagai berikut:

- a. Memberi arah pada proses sosialisasi; Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai norma-norma dan pengetahuan;
- b. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat;
- c. Menghidupkan sistem pengendalian dan control, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

2.5 Teori Pengelolaan

Konsep pengelolaan dalam kamus besar bahasa Indonesia (2010) didefinisikan mengenai pengelolaan sebagai berikut :

- a. Proses, cara dan perbuatan.
- b. Proses melakukan perbuatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain.
- c. Proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi.
- d. Proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

Menurut (Terry, 2009) pengelolaan (*management*) adalah sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan: menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Sedangkan menurut (Suprpto, 2009) mendefinisikan manajemen merupakan sebagai seni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengontrolan atas *human and national resources* (terutama *human resources*) untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan lebih dahulu.

Jadi Pengelolaan itu sendiri merupakan suatu proses kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.

- a. Perencanaan (*planning*), adalah suatu pemeliharaan yang berhubungan dengan waktu yang akan datang dalam menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan demi mencapai hasil yang dikehendaki.
- b. Pengorganisasian (*organizim*), adalah penentuan, pengelompokan dan pengaturan berbagai kegiatan yang dianggap perlu untuk mencapai tujuan.
- c. Pelaksanaan (*actuating*), adalah usaha agar setiap anggota kelompok mengusahakan pencapaian tujuan dengan berpedoman pada perencanaan dan usaha pengorganisasian.

- d. Pengawasan (*controlling*), adalah proses penentuan apa yang seharusnya diselesaikan yaitu penilaian pelaksanaan bila perlu melakukan tindakan korektif agar pelaksanaannya tetap sesuai dengan rencana.

2.6 Teori Wisata

Obyek wisata merupakan segala sesuatu yang ada di daerah tujuan wisata yang merupakan daya tarik agar orang-orang mau datang berkunjung ke tempat tersebut. Menurut SK. MENPARPOSTEL No.: KM. 98 / PW.102 / MPPT-87, obyek wisata adalah semua tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya wisata yang dibangun dan dikembangkan sehingga mempunyai daya tarik dan diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan.

Apabila secara etimologis pariwisata berasal dari bahasa sangsekerta yang mana terdiri dari dua kata yaitu “pari” dan “wisata”. Pari berarti berulang-ulang, berkali-kali atau berputar-putar, sedangkan wisata berarti perjalanan atau bepergian, jadi pariwisata berarti perjalanan yang dilakukan secara berputarputar, berulang-ulang atau berkali-kali menurut (Yoeti, 2001).

Pariwisata dapat didefinisikan sebagai suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat lain dengan maksud bukan untuk berusaha (*business*) atau mencari nafkah ditempat yang dikunjungi, akan tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna bertamasya dan rekreasi untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam. Sedangkan didalam Undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan

pemerintah daerah. Menurut (Warpani, 2007) pariwisata adalah suatu kegiatan kemanusiaan berupa hubungan antar orang, baik dari Negara yang sama atau hanya dari daerah geografis yang terbatas. Di dalamnya termasuk tinggal untuk sementara waktu di daerah lain atau Negara lain atau benua lain untuk memenuhi berbagai kebutuhan kecuali kegiatan untuk memperoleh penghasilan.

B. Kajian Terdahulu

Table II.1 Penelitian Terdahulu

No	Identitas Jurnal	Judul	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	2	3	4	5
1	Dewi Citra Lestari, Ya' taufiq Nurrahman	Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola Wisata Hutan Pinus Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Bendosari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang	sama-sama bertujuan untuk mengetahui peran Pemerintah Desa dalam pengelolaan wisata	Objek penelitian yang akan diteliti
2	Moh.Jefri Pratama	Peran kepala desa dalam pengembangan potensi pariwisata desa	Variable peran	Perbedaan pada vareabel peran kepada desa
3	Purnadi	Strategi pemerintah desa dalam pengembangan objek wisata study wisata hiu pulau lemdang desa Labuan jambu kecamatan tarano kabupaten Sumbawa tahun 2018	Membahas pemerintah desa dalam objek wisata	Perbedaan pada strategi pengembangan

1	2	3	4	5
4	Setyaningsi	Peran pemerintah desadalam pengelolaan desa wisata berupa pantai pidakan dan watubale di desa jetak, kecamatan talukun	Peranan pemerintah	Lokasi penelitian
5	Dewi Citra Larasati, Ya'taufiq Kurrahman	Peran pemerintah desadalam mengelolah wisata hutan pinus untuk meningkatkan pendapatan asli desa di desa bendosari, kecamatan pujon, kabupaten malang	Peran pemerintah desa dalam pengelolaan wisata	Lokasi penelitian
6	Eet Syaful Hidayat, Didi Djajuli, Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, Volume 7 Nomor 2,2020	Peran pemerintah desadalam pengembangan objek wisata curug kembar desaraksabaya	Sama-sama membahas peran pemerintah dalam pengembangan objek wisata	Lokasi penelitiannya
7	Oktavia Suryaningsih, Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara (JMAN), Vol. 02 No. 01,2018	Peran lembaga desa dalam pengembangan desa wisata wanurejodan dampak terhadap perekonomian masyarakat lokal	Persamaan terletak pada sama-sama menggunakan metode kualitatif	Terletak pada variable lembaga desa dalam pengembangan objek wisata desa

Sumber : *Olahan Peneliti, 2022*

C. Kerangka Pkir

Gambar I.1 : Kerangka Pola Pikir



Sumber : Olahan Penulis, 2022

D. Konsep Operasional

1. Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi serta melindungi kebutuhan dan tuntutan setiap orang akan pelayanan publik dan pelayanan sipil dalam hubungan pemerintahan. Pemerintahan itu memiliki dua fungsi dasar yaitu yang pertama fungsi primer atau fungsi pelayanan dan serta fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan.
2. Pemerintahan secara umum adalah orang atau sekelompok orang yang diberikan legitimasi oleh masyarakat untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah, dan dilengkapi oleh alat-alat kelengkapan negara yang berperan membantu pemerintah dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan.
3. Desa ini merupakan suatu wilayah suatu kesatuan masyarakat yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang memiliki system pemerintahan sendiri dan

diakui dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Ataupun Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan
5. Peran aktif pemerintah desa adalah peran yang di berikan oleh pemerintah Desa karena kedudukannya, seperti pengurus, pejabat dan lainnya sebagainya yang berfungsi untuk memberikan pengawasan dan serta memberikan petunjuk Dalam Pengelolaan sektor wisata Jai-Jai Raok Desa Padang Tanguang Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantang Singingi.
6. Peran partisipatif Pemerintah Desa adalah peran yang diberikan oleh Pemerintah Desa kepada pengelola seperti melakukan petunjuk atau memberi petunjuk kepada pengelola objek wisata jai-jai raok serta meningkatkan rasa saling pengertian dalam pengelolaan sektor wisata Jai-Jai Raok Desa Padang Tanguang Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.
7. Sedangkan peran pasif adalah dimana pemerintah desa dapat memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok dapat berjakan dengan baik dengan melakukan kebebasan dan melakukan evaluasi dalam pengelolaan sektor wisata jai-jai raok Desa Padang Tanguang Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantang Singingi.

E. Operasional Variabel

Tabel 1.1 : Operasional Variabel

Konsep	Variabel	Indikator Variabel	Sub Indikator
Menurut Soerjono Soekanto (2002:243) Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan	Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan sektor wisataJai-Jai Raok Desa Padang Tangguang Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantang Singingi	1. Peran Aktif Pemerintah Desa 2. Peran Partisipatif Pemerintah Desa 3. Peran Pasif Pemerintah Desa	<p>a. Memberikan Pengawasan terhadap pngelolaan objek wisata jai-jai raok</p> <p>b. Memberikan Petunjuk dalam pengelolaan objek wisata jai-jai raok</p> <p>a. Melakukan Pentujuk dalam pengelolaan objek wisata seperti pembangunan yang terjadi</p> <p>b. Meningkatkan saling Pengertian dalam melaksanakan pengelolaan antara pemerintah desa, masyarakat dan juga pengelola objek wisata</p> <p>a. Melakukan Kebebasan ataupun dukungan kepada masyarakat untuk sama sama berperan serta dalam pengelolaan objek wisata jai-jai raok</p> <p>b. Melakukan Evaluasi terhadap</p>

			pengelolaan objek wisata jai-jai raok
--	--	--	---------------------------------------

Sumber : Olahan Penulis, 2022



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang mencoba untuk menggambarkan fenomena-fenomena alam, fenomena sosial yang dinarasikan tanpa menggunakan analisis statistika.

Fokus penelitian ini adalah bagaimana Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Wisata Jai- Jai Raok Desa Padang Tanggung Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini diadakan di Desa Padang Tanggung Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun pertimbangan menetapkan lokasi penelitian di desa ini adalah karena penulis lebih memahami situasi dan kondisi Desa Padang Tanggung Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi ini dijumpai fenomena kehidupan masyarakat yang menarik untuk di teliti.

3.3 Informan Penelitian

Didalam buku Metode Riset Kualitatif (Daymon, 2008) menyatakan bahwa “key informa adalah wakil kelompok yang diteliti, yang telah berada cukuplama dalam kebudayaan, sehingga memiliki pengetahuan menyangkut aturan-aturan, dan bahasa kebudayaan tersebut”. Key informan yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki bagian informasi pokok yang di perlukan dalam penelitian.

Menurut Moleong (2000:97) informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Adapun kriteria yang ingin peneliti jadikan sebagai informan adalah subjek ataupun individu yang peneliti anggap mampu dan mengetahui permasalahan yang akan diteliti dengan kriteria antara lain:

1. Berada di daerah yang akan diteliti
2. Mengetahui serta terlibat langsung dengan kejadian atau permasalahan
3. Dapat berargumentasi dengan baik
4. Merasakan dampak dari kejadian/permasalahan

Table III.1 : Informasi Penelitian

No	Jabatan	Keterangan
1)	Kepala Desa Padang Tanggung	Key Informan
2)	Sekretaris Desa Padang Tanggung	Informan
3)	Pengelola Wisata Jai-Jai Raok	Informan
4)	Pengunjung Wisata	Informan

Sumber : Olahan Penulis, 2022

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah kualitatif dengan tipe deskriptif. Menurut Sugiyono (2016:9) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Adapun sumber data yang dikumpulkan yaitu:

Data Primer : yaitu data yang diperoleh dari para responden melalui penelitian lapangan tentang Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Wisata Jai- Jai Raok

Desa Padang Tanggung. Data yang diperoleh melalui hasil wawancara dan observasi.

Data Sekunder : yaitu data yang diperoleh dari pihak kedua yang berupa keterangan-keterangan yang relevan yang dapat menunjang objek dalam penelitian ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun cara yang dipakai penulis dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah teknik :

a. Interview (wawancara)

Yaitu teknik dengan mengajukan pertanyaan kepada informan dan secara mendalam yang dianggap mengerti permasalahan yang diteliti. Wawancara yang dimaksud adalah wawancara penulis dengan informen penelitian.

b. Observasi

Yaitu sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri-ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara. Kalau wawancara selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam lain.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal berupa catatan,transkrip, buku, surat kabar, majalah, rapat dan sebagainya. Adapun dokumentasi dalam penelitan ini, berupa foto-foto mengenai wawancara dan yang lainnya.

3.6 Teknik Analisa Data

Untuk mengetahui bagaimana Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Wisata Jai- Jai Raok Desa Padang Tanggung Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi peneliti ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang mencoba untuk menggambarkan fenomena-fenomena alam, fenomena sosial yang dinarasikan tanpa menggunakan analisis statistika. Berikut ini adalah beberapa tahapan yang dipakai untuk menganalisis data:

1. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Data yang sudah direduksi memberikan gambaran data yang tepat dan dapat membantu penulis dalam pengumpulan data.

2. Penyajian data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat deskriptif. Informasi yang didapat dilapangan disajikan dalam teks dengan sebaik mungkin tanpa adanya penambahan dari fakta yang ada. Hal tersebut bertujuan untuk dapat menyajikan data yang telah direduksi dengan tepat dan dengan keadaan yang sebenarnya dilapangan.

3. Penarikan kesimpulan

Tahap akhir pengolahan data adalah penarikan kesimpulan. Setelah semua data tersaji permasalahan yang menjadi objek penelitian dapat dipahami dan kemudian dapat ditarik kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian ini.

3.7 Jadwal Waktu Penelitian

Table III.2 Jadwal Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu															
		Feb - Mar				Apr - Mei				Jun - Jul				Ags - Sep			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan Penyusunan																
2	Seminar UP																
3	Perbaikan UP																
4	Revisi kuesiner																
5	Rekomendasi survey																
6	Survey lapangan																
7	Analisis data																
8	Penyusunan laporan hasil penelitian																
9	Konsultasi revisi Skripsi																
10	Ujian komprehensif Skripsi																
11	Revisi skripsi																
12	Penggandaan skripsi																

Sumber : Data Olahan, 2022

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1 Kondisi Desa Padang Tanggung

1. Sejarah Desa

A. Rantau Kuantan Singingi dijajah Belanda Selama (\pm) 40 Tahun

Perjuangan heroic rakyat Indonesia tercermin dalam perlawanan rakyatnya menentang dan mengandang serbuan bala tentara belanda untuk menjajah negeri nusantara, di berbagai daerah terjadi perlawanan rakyat menentang penjajah Belanda. Tidak terkecuali rakyat di Rantau Kuantan. Berkat perjuangan gigih rakyatnya maka pada tahun 1905 M barulah Kuantan Singingi yang di kenal dengan sebutan rantau nan kurang aso duo pulua jatuh ke dalam kekuasaan penjajah Belanda. Dengan kata lain Kabupaten Kuantan Singingi sekarang ini hanya dijajah Belanda selama (\pm) 40 tahun. Padahal Nusantara Indonesia secara resmi di jajah Belanda selama (\pm) 350 tahun.

Demikian itulah satu kenyataan yang perlu di herankan, karena ternyata daerah lain dinusantara Indonesia ada diantaranya yang tidak pernah tahluk dibawa penjajahan Belanda. Daerah yang dimaksud adalah kawasan provinsi Aceh sekarang ini, berkat perjuangan yang gigih rakyatnya yang dipimpin oleh pemimpinnya antara lain Teuku Umar, Sri Kandi, Cut Nyak Dien dan lain-lain.

B. Tugu Peringatan Perjuangan Rakyat Kuantan Menentang Penjajah Belanda.

Sehubungan dengan itu guna mengenang dan menghargai jasa perjuangan rakyat Kuantan sehingga dapat dijadikan suri tauladan bagi penerus perjuangan pembangunan negeri minimal dibangun sebuah tugu peringatan dengan mencantumkan nama-nama para pemimpin perjuangannya. Disamping pembuatan tugu hendaknya sekaligus dibangun kembali beberapa benteng pertahanan rakyat Kuantan mengacu kepada tata letak, bentuk serta keberadaannya di masa perang termasuk mengembalikan berbagai peralatan perang yang pernah dipergunakan seperti meriam, bedil dan sebagainya.

Yang menjabat sebagai Kepala Desa Padang Tanggung sebagai berikut :

Tabel IV.1 : Kepala Desa Padang Tanggung dari Periode ke Periode

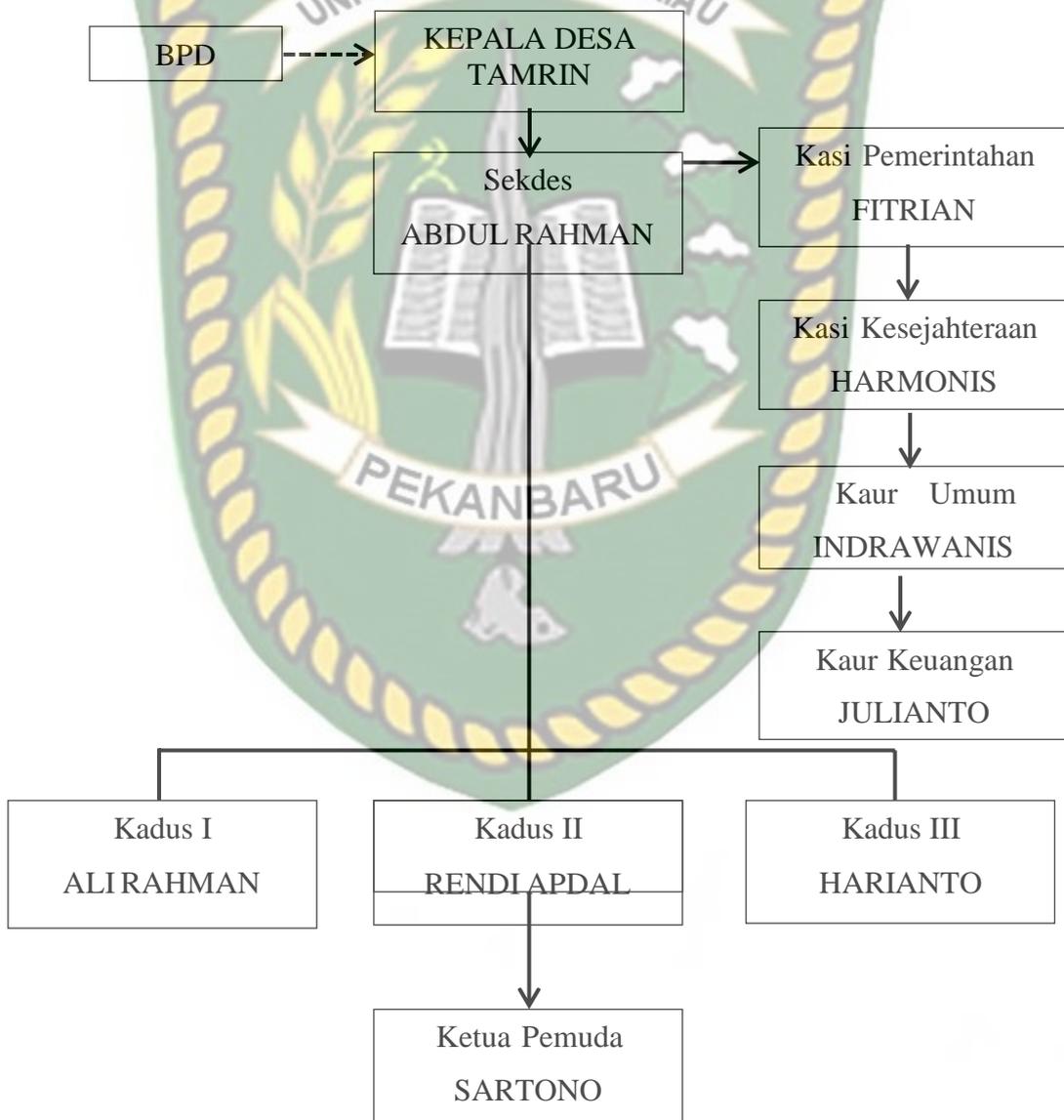
No	Periode Tahun	Nama Kepala Desa
1)	Periode Tahun 1984 s/d 1992	MUSA MUSMIEL dan Sekdes ABASRI
2)	Periode Tahun 1992 s/d 1993	NURDIN (Pj Kepala Desa) dan Sekdes ABASRI
3)	Periode Tahun 1993 s/d 2001	ABU BASRI dan Sekdes IBAN BAKRI
4)	Periode Tahun 2001 s/d 2006	MISRIADI dan Sekdes ABDUL RAHMAN
5)	Periode Tahun 2006 s/d 2012	JAPRUZA, A. md dan Sekdes ABDUL RAHMAN
6)	Periode Tahun 2012 s/d 2010	JUNAIDI EPENDI dan Sekdes ABDULRAHMAN
7)	Periode Tahun 2019 s/d 2020	ELPIS (Pj Kepala Desa) dan Sekdes ABDUL RAHMAN
8)	Periode Tahun 2020 s/d Sekarang	THAMRIN dan sekdes ABDUL RAHMAN

Sumber : Olahan Penulis, 2022

2. Stuktur Organisasi Pemerintah Desa

Struktur Organisasi Desa Padang Tanggung Kecamatan Parigan menganut sistem kelembagaan pemerintah desa dengan pola minimal, selengkapnya disajikan dengan Gambar sebagai berikut :

Gambar IV. 1 : Struktur Organisasi Pemerintah Desa Padang Tanggung Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi



Sumber : RPJM Desa Padang Tanggung 2020-2026

3. Demografi

Tabel IV.2 : Demografi Desa Padang Tanggung

No	Demografi	Dibagi Atas
1)	Batas Wilayah Desa	Letak geografis Desa Padang Tanggung, terletak diantara : Sebelah Utara : Sungai Kuantan Sebelah Selatan : Sungai Kuantan Sebelah Barat : Sungai Kuantan Sebelah Timur : Teluk Pauh
2)	Luas Wilayah Desa	a. Pemukiman (60,13 Ha) b. Pertanian Sawah (-) c. Lading/ tegalan (-) d. Perkebunan (13 Ha) e. Hutan (-) f. Rawa-rawa (1 Ha) g. Perkotaan (-) h. Sekolah (0,5 Ha) i. Jalan (2,8 Ha) j. Lapangan sepak bola (1 Ha)
3)	Orbitasi	a. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat 3 Km b. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan (\pm) 15 Menit c. Jarak ke ibu kota kabupaten 30Km k. Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten (\pm) 45 Menit
4)	Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin	a. Kepala keluarga : 102 KK b. Laki-laki : 195 Jiwa d. Perempuan : 201 Jiwa

Sumber : Olahan Penulis, 2022

4. Keadaan Sosial

Tabel IV.3 : Keadaan Sosial Desa Padang Tanggung

No	Keadaan Sosial	Jumlah
1)	Pendidikan	TK/ PAUD : 42 Jiwa SD/ MI : 24 Jiwa SLTP/ MTS : 17 Orang SLTA/ MA : 11 Orang S1/ Diploma : 23 Orang Putus Sekolah : - Buta Huruf : 5 Orang

2)	Lembaga Pendidikan	TK/ PAUD : 1 Buah SD/ MI : 1 Buah SLTP/ MTS : - SLTA/ MA : - b. Lain-lain : -
----	--------------------	---

Sumber : Olahan Penulis, 2022

5. Keadaan Ekonomi

Tabel IV.4 : Keadaan Ekonomi Desa Padang Tanggung

No	Keadaan Ekonomi	Dibagi Atas
1)	Pertanian	a. Sawit : 3 Ha b. Karet : (\pm) 10 Ha
2)	Peternakan	a. Kambing : 60 Ekor b. Sapi : 72 Ekor c. Kerbau : 2 Ekor c. b. Ayam : 500 Ekor
3)	Struktur Mata Pencarian	a. Petani : 90 Orang b. Pedagang : 3 Orang c. PNS : 7 Orang d. Tukang : 3 Orang e. Guru : 4 Orang f. Bidan/ Perawat : 1 Orang g. TNI/ Polri : - h. Pensiunan : 1 Orang i. Sopir/ Angkutan : - j. Buruh : - k. Jasa Persewaan : - l. Swasta : 5 Orang d. Peternak : -

Sumber : Olahan Penulis, 2022 B. Kondisi Pemerintahan Desa

B. Kondisi Pemerintahan Desa

Tabel IV. 5 : Kondisi Pemerintah Desa Padang Tanggung

No	Kondisi Pemerintah Desa	Dibagi Atas
1)	Lembaga Pemerintah	Kepala Desa : 1 Orang Sekretaris Desa : 1 Orang Perangkat Desa : 7 Orang BPD : 5 Orang

2)	Lembaga Kemasyarakatan	LPM : 1 Lembaga PKK : 1 Lembaga Posyandu : 3 Posyandu Pengajian : 1 Kelompok Arisan : 2 Kelompok Simpan Pinjam : - Kelompok Tani : 1 Kelompok Gapoktan : - Karang Taruna : - Risma : - Ormas/LSM : - Lain-lain : -
3)	Pembagian Wilayah	Dusun I : 2 RT Dusun II : 2 RT 2. Dusun III : 1 RT

Sumber : Olahan Penulis, 2022

C. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Demokratisasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi dari masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada sebagai mitra Pemerintah Desa yang mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa sehingga diharapkan adanya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Atas dasar pertumbuhan tersebut di atas, maka untuk jangka waktu 6 (enam) tahun ke depan diharapkan proses pembangunan di desa penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa partisipasi masyarakat siltap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan Intensif RT/RW dapat benar-benar mendasarkan pada prinsip

keterbukaan dan partisipasi masyarakat sehingga secara bertahap Desa Padang Tanggung dapat mengalami kemajuan Untuk itu dirumuskan Visi dan Misi.

a. Visi Desa

"Terwujudnya Padang Tanggung Sebagai Desa Yang Mandiri berbasis Pertanian dan Perikanan untuk mencapai Masyarakat yang sehat dan sejahtera"

b. Misi Desa

Untuk mewujudkan ibabul maha ditetapkan "MISI" pembangunan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur
2. Meningkatkan Pembangunan di bidang Kesehatan
3. Meningkatkan Pembangunan di bidang peternakan dan Perikanan
4. Meningkatkan tata kelola yang baik
5. Mengupayakan pelestarian sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan guna meningkatkan perekonomian.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui bagaimana Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Wisata Jai- Jai Raok Desa Padang Tanggung Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi akan dijelaskan berdasarkan uraian berikut ini :

A. Identitas Responden

Informan dalam penelitian ini terdiri dari seorang Kepala Desa Padang Tanggung, Sekretaris Desa Padang Tanggung, Penjaga Wisata atau Pengelolaan Wisata Jai- Jai Raok Desa Padang Tanggung, serta pengunjung Wisata Jai- Jai Raok Desa Padang Tanggung Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun identitas informan penelitian berdasarkan pendidikan, jenis kelamin, dan usia sebagai berikut :

1. Jenis Kelamin

Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Wisata Jai- Jai Raok Desa Padang Tanggung Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi distribusi informan menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.1 : Informan Menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Infoman
1.	Laki-Laki	2 Orang
2.	Perempuan	2 Orang
Jumlah		4 Orang

Sumber : Olahan Penulis, 2022

2. Pendidikan

Secara teoritis pendidikan terakhir akan mempengaruhi seseorang dalam memberikan jawaban sesuai dengan pemahaman yang telah dilakukan pada saat dilaksanakan penelitian. Mengingat penelitian merupakan penelitian lapangan maka dengan melibatkan beberapa unsur, maka dari itu informan berdasarkan pendidikan terakhir dapat dijelaskan pada table berikut ini :

Tabel V.2 : Informan Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan Terakhir	Jumlah Informan
1.	Sekolah Menengah Akhir (SMA)	3
2.	S1	1
Jumlah		4 Orang

Sumber : Olahan Penulis, 2022

3. Usia Informan

Dalam menentukan Informan, dapat juga dilihat melalui factor usia, yang mana dengan pertimbangan jawaban yang telah diberikan akan mempengaruhi seseorang dalam menentukan pilihan. Tingkat usia informan dalam penelitian ini dapat diterangkan dalam table berikut :

Tabel V.3 : Informan Berdasarkan Usia

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Informan
1.	30-40	3 Orang
2.	40-55	1 Orang
Jumlah		4 Orang

Sumber : olahan penulis, 2022

4. Informan Berdasarkan Jabatan

Dalam penelitian ini, Jumlah Keseluruhan informan adalah 8 orang.

Berikut akan di uraikan berdasarkan jabatan:

Tabel V.4 : Identitas informan Berdasarkan Jabatan

No	Nama	Jabatan	Jumlah
1.	M. Tamrin	Kepala Desa Padang Tanggung	1
2.	Abd. Rahman	Sekretaris Desa Padang Tanggung	1
3.	Siska Leona	Pengelola Objek Wisata	1
4.	Poni Putri	Pengunjung Objek Wisata	1
	Jumlah		4

Sumber : Olahan Penulis, 2022

B. Hasil Analisis dan Pembahasan Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Wisata Jai- Jai Raok Desa Padang Tanggung Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi

Dalam pembahasan BAB V ini, akan dipaparkan serta diuraikan mengenai hasil penelitian tentang Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Wisata Jai- Jai Raok Desa Padang Tanggung Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini memfokuskan pada Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Wisata Jai- Jai Raok. Penelitian ini mendapatkan data melalui hasil Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.

Pada penelitian ini, sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, data yang didapatkan oleh penulis berasal dari wawancara yang telah dipilih sesuai dengan kriteria peneliti yang dianggap dapat mewakili dari penelitian yang telah diangkat.

Narasumber yang dipilih adalah orang yang mengetahui dan terlibat tentang Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Wisata Jai- Jai Raok Desa Padang Tanggung Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

Hasil observasi serta wawancara merupakan data primer dalam penelitian ini, kemudian data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari dokumentasi yang terdapat pada Wisata Jai- Jai Raok Desa Padang Tanggung Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Wawancara yang dilakukan penulis merupakan sebuah proses Tanya jawab yang langsung secara lisan maupun melalui alat komunikasi antara peneliti dengan narasumber mengenai hal-hal yang perlu diketahui dalam penelitian ini. Wawancara yang dilakukan memfokuskan dan menanyakan upaya-upaya mengenai Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Wisata Jai- Jai Raok Desa Padang Tanggung Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Berdasarkan indikator variable penelitian yang ada diantaranya adalah :

1. Peran Aktif Pemerintah Desa

Peran aktif pemerintah desa adalah peran yang di berikan oleh pemerintah Desa karena kedudukannya, seperti pengurus, pejabat dan lainnya sebagainya yang berfungsi untuk memberikan pengawasan dan serta memberikan petunjuk Dalam Pengelolaan sektor wisata Jai-Jai Raok Desa Padang Tanggung Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantang Singingi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Kepala Desa Padang Tanggung Bapak M. Tamrin pada Tanggal 12 April 2022, mengenai Bagaimana Peran Aktif Pemerintah Desa Dalam Memberikan Pengawasan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Kepala Desa Padang Tanggung Bapak M. Tamrin pada Tanggal 12 April 2022, mengenai Bagaimana Peran Aktif Pemerintah Desa Dalam Memberikan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Wisata Jai Jai Raok Serta Apakah Telah Ada Peran Pemerintah Desa Dalam Memberikan Petunjuk Atau Arahan Dalam Pengelolaan Wisata Jai Jai Raok , beliau mengatakan bahwa :

“sebagai pelindung sekaligus penasehat untuk mengevaluasi badan usaha milik desa yaitu wisata jai-jai raok ini. Yang mana telah ada peran pemeritahan desa dalam memberikan petunjuk terhadap pengelolaan wisata jaijai raok tersebut sudah pasti ada karna itu adalah salah satu fungsi dari pemerintah desa tersebut guna untuak mngembangkan badan usaha wisata jai-jai raok tersebut”. (Kepala Desa Padang Tanggung Bapak M. Tamrin pada Tanggal 12 April 2022)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Sekretaris Desa Padang Tanggung Bapak Abd. Rahman, pada tanggal 12 April 2022, terkait Bagaimana Peran Aktif Pemerintah Desa Dalam Memberikan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Wisata Jai Jai Raok Serta Apakah Telah Ada Peran Pemerintah Desa Dalam Memberikan Petunjuk Atau Arahan Dalam Pengelolaan Wisata Jai Jai Raok , beliau mengatakan bahwa :

“dengan memberikan dukungan dan kerjasamaa terhadap pengelolaan wisata tersebut,dan tak lupa pula untuk memberikan masukan atau arahan terhadap pengelolaan wisata jai- jai raok tersebut. Selanjutnya Sudah ada nya peran pemeritahan desa dalam memberikan petunjuk ataupun arahan dalam pengelolaan wisata jai-jai raok tersebut dengan memberikan laporan dan dukungan yang dilakukan oleh badan pemeritahan desa dan perivikasi terhadap segala kegiatan yang dilakukan”. (Sekretaris Desa Padang Tanggung Bapak Abd. Rahman, pada tanggal 12 April 2022)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan penjaga ataupu pengelola objek wisata jai-jai raok Desa Padang Tanggung kepada Ibu Siska Leona pada 12 April 2022, terkait Bagaimana Peran Aktif Pemerintah Desa Dalam

Memberikan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Wisata Jai Jai Raok Serta Apakah Telah Ada Peran Pemerintah Desa Dalam Memberikan Petunjuk Atau Arahan Dalam Pengelolaan Wisata Jai Jai Raok , beliau mengatakan bahwa :

“sebagai pengawas untuk mewujudkan agarkan wisata jai-jai raok ini agar dapat berjalan dan berkembang dengan baik dan aman. Peran pemerintah desa dalam memberikan petunjuk atau arahan dalam pengelolaan wisata jai-jai raok ini tentu ada, karna arahan itu amat sangt penting bagi kemajuan wisata jai-jai raok ini.” (Pengelola Objek Wisata Jai-Jai Raok Desa Padang Tanggung Kepada Ibu Siska Leona Pada 12 April 2022)

Dalam wawancara yang dilakukan penulis melakukan wawancara dengan Pengunjung objek wisata jai-jai raok Ibu Poni Putri pada 12 April 2022, terkait Bagaimana Peran Aktif Pemerintah Desa Dalam Memberikan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Wisata Jai Jai Raok Serta Apakah Telah Ada Peran Pemerintah Desa Dalam Memberikan Petunjuk Atau Arahan Dalam Pengelolaan Wisata Jai Jai Raok, beliau mengatakan bahwa :

“Peran pemdes dalam pengawasan pengelolaan itu menurut saya sangat penting, apalagi tempat wisata tersebut memiliki potensi yang besar. Sepengetahuan saya sebagai pengunjung wisata jai-jai raok, pemdes setempat sangat berperan aktif terhadap pengawasan pengelolaan tempat wisata ini, buktinya wisata jai-jai raok ini bukan hanya sekedar tempat wisata melainkan wisata jai-jai raok sudah termasuk kedalam unit Badan Usaha Milik Desa atau biasa disebut dengan BUMDes oleh pemdes setempat. Jadi, Wisata Jai-Jai Raok ini di kelola oleh BUMDes dan di bawah pengawasan Pemdes. Ya , tentu saja pemdes setempat telah memberikan petunjuk serta arahan dalam pengelolaan wisata Jai-Jai Raok ini. Karena jika pemdes tidak berperan dalam hal ini maka wisata Jai-Jai Raok tidak akan bisa berjalan. Salah satunya pemdes membantu membentuk pengurus pengelolaan wisata jai-jai raok yang telah berada di dalam BUMDes, pemdes memberikan arahan-arahan serta pandangan bagaimana agar wisata jai-jai raok bisa berkembang”. (Pengunjung objek wisata jai-jai raok Ibu Poni Putri pada 12 April 2022)

Dapat disimpulkan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Key Informan dan Informan mengenai Bagaimana Peran Aktif

Pemerintah Desa Dalam Memberikan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Wisata Jai Jai Raok Serta Apakah Telah Ada Peran Pemerintah Desa Dalam Memberikan Petunjuk Atau Arahan Dalam Pengelolaan Wisata Jai Jai Raok bahwa kalau untuk peran aktif pemerintahan desa dalam memberikan pengawasan terhadap pengelolaan wisata jai-jai raok adalah dengan memberikan dukungan dan kerjasamaa terhadap pengelolaan wisata tersebut, dan tak lupa pula untuk memberikan masukan atau arahan terhadap pengelolaan wisata jai- jai raok tersebut, namun tidak di jelaskan bahwasannya arahnya seperti apa yang telah diberikan pemerintah desa terhadap pengelolaan objek wisatanya. Selanjutnya kerjasama apa saja yang telah di lakukan pemerintah desa dengan objek wisata pun tidak tahu dalam bentuk apa. Selain hanya menjelaskan bahwa objek wisata jai-jai raok ini merupakan bagian dar BUMDes yang ada di Desa Padang Tanggung.

2. Peran Partisipatif Pemerintah Desa

Peran partisipatif Pemerintah Desa adalah peran yang diberikan oleh Pemerintah Desa kepada pengelola seperti melakukan petunjuk atau memberi petunjuk kepada pengelola objek wisata jai-jai raok serta meningkatkan rasa saling pengertian dalam pengelolaan sektor wisata Jai-Jai Raok Desa PadangTanggung Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantang Singingi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Kepala Desa Padang Tanggung Bapak M. Tamrin pada Tanggal 12 April 2022, Bagaimana Partisipasi Pemerintah Desa Dalam Melakukan Petunjuk Wisata Jai Jai Raok serta Bagaimana Cara Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pengertian Antara Masyarakat Dalam Pengelolaan Wisata Jai Jai Raok , beliau mengatakan bahwa :

“salah satunya bersifat proaktif yang mana bergerak dalam kegiatanyang ada dalam pengelolaan wisata jai-jai raok ini. Cara pemerintah desa dalam meningkatkan pemgertian antaran masyarakat dalam pengelolaan wisata jai-jai raok ini adalah dengan memberikan pemahaman terhadap masyarakat dan salah satunya membentuk pokdarwis dalam meningkatkan pengertian tersebut”.(Kepala Desa Padang Tanggung Bapak M. Tamrin pada Tanggal 12 April 2022)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Sekretaris Desa Padang Tanggung Bapak Abd. Rahman, pada tanggal 12 April 2022, terkait Bagaimana Partisipasi Pemerintah Desa Dalam Melakukan Petunjuk Pengelolaan Wisata Jai Jai Raok serta Bagaimana Cara Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pengertian Antara Masyarakat Dalam Pengelolaan Wisata Jai Jai Raok , beliau mengatakan bahwa :

“dengan memberikan arahan kepada pengelola wisata jai-jai raok tersebut baik itu tentang penggunaan dana pengeluaran dan pemasukan dana dalam pelaksanaan kegiatan di jai-jai raok ini. Cara pemerintahan desa dalam meningkatkan pengertian antara antara masyarakat dalam pengelolaan wisata jai-jai raok dengan adanya kerjasama dalam organisasi yang disebut dengan (Pokdarwis) dengan arahan dari pemerintahan desa dan Badan Usaha Milik Desa kepada pengelola wisata jai-jai raok tersebut untuk melakukan segala bentuk kegiatan”. (Sekretaris Desa Padang Tanggung Bapak Abd. Rahman, pada tanggal 12 April 2022)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan penjaga ataupun Pengelola Objek Wisata Jai-Jai Raok Desa Padang Tanggung Kepada Ibu Siska Leona Pada 12 April 2022, terkait Bagaimana Partisipasi Pemerintah Desa Dalam Melakukan Petunjuk Pengelolaan Wisata Jai Jai Raok serta Bagaimana Cara Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pengertian Antara Masyarakat Dalam Pengelolaan Wisata Jai Jai Raok , beliau mengatakan bahwa :

“Partisipasi pemerintah desa dalam melakukan petunjuk pengelolaan wisata jaijai raok sudah pasti ada sejauh ini pemerintah desa sangat aktif dalam memberikan partisipasi kepada pengurus jaijai raok atau pngelolanya dalam bentuk dukungan ataupun masukan dan saran terhadap

pengelola. Cara pemrintah desa dalam meningkatkan pengertian masyarakat adalah dengan cara memberikan arahan yang baik dan mendengarkan keluhan2 dari msyarakat dalam pengelolaan wisata jaijai raok ini. Dan memberikan penyadaran yg mana penyadaran ini merupakan kegiatan memberikan informasi mengenai deskripsi tentang pengelolaan wisata jai jai raok ini. Dalam hal ini semoga dapat memahami dan diharapkan dapat menumbuhkan rasa saling pengertian antaran masyarakat pemerintah desa ataupun pengelola wisata jai-jai raok ini". (Pengelola Objek Wisata Jai-Jai Raok Desa Padang Tanggung Kepada Ibu Siska Leona Pada 12 April 2022)

Dalam wawancara yang dilakukan penulis melakukan wawancara dengan Pengunjung objek wisata jai-jai raok Ibu Poni Putri pada 12 April 2022, terkait Bagaimana Partisipasi Pemerintah Desa Dalam Melakukan PetunjukPengelolaan Wisata Jai Jai Raok serta Bagaimana Cara Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pengertian Antara Masyarakat Dalam Pengelolaan Wisata Jai-Jai Raok, beliau mengatakan bahwa :

"Peran pemerintah Desa dalam melakukan petunjuk pengelolaan wisata jai-jai raok diantaranya membantu membentuk pengurus pengelolaan wisata jai- jai raok yang telah berada di dalam BUMDes, menyediakan insfratraktur (tidak hanya bentuk fisik), namun pada saat ini dari kondisi yang kita lihat bersama- sama bahwa penyediaan infrasutuktur secara fisiknya sedang tidak mendapatkan perawatan yang baik, memperluas berbagai fasilitas, kegiatan koordinasi anatara aparatur pemerintah dengan wisata, pengaturan dan promosi umum ke luar desa,kecamatan bahkan kabupaten. Sejauh ini saya melihat tidak ada konflik antara masyarakat dengan Pemrintah Desa maupun dengan pengurus wisata, menurut saya itu berarti bahwa Pemerintah Desa mampu untuk memberikan pengertian kepada masyarakat dalam pengelolaan wisata jai-jai raok ini. Dimana, Pemerintah Desa selalu terbuka kepada masyarakat mengenai pengelolaan wisata jai-jai raok ini. Pemerintah Desa mengadakan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan arahan dan pemahaman kepada masyarakat mengenai potensi wisata yang ada. Potensi wisata ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, kesejahteraan masyarakat terjamin. Apabila perekonomian masyarakat meningkat dan akanmembawa dampak terhadap meningkatnya pendapatan asli desa. Oleh karena itu, setelah sosialisasi dilakukan, diharapkan masyarakat mengetahui mengenai potensi wisata jai-jai raok. Masyarakat harus mengetahui dalam proses pengelolaannya. Mulai dari perencanaan, penganggaran, pembangunan, pengelolaan

hingga pengawasan”. (Pengunjung objek wisata jai-jai raok Ibu PoniPutri pada 12 April 2022)

Dapat disimpulkan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Key Informan dan Informan mengenai Bagaimana Partisipasi Pemerintah Desa Dalam Melakukan Petunjuk Pengelolaan Wisata Jai Jai Raok serta Bagaimana Cara Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pengertian Antara Masyarakat Dalam Pengelolaan Wisata Jai Jai Raok bahwasannya salah satu peran partisipatif pemerintah desa dalam melakukan petunjuk pengelolaan wisata jai-jai raok ini adalah salah satunya bersifat proaktif yang mana bergerak dalam kegiatan yang ada dalam pengelolaan wisata jai-jai raok ini. Cara pemerintahan desa dalam meningkatkan pengertian antara masyarakat dalam pengelolaan wisatajai-jai raok dengan adanya kerjasama dalam organisasi yang disebut dengan (Pokdarwis) dengan arahan dari pemerintahan desa dan Badan Usaha Milik Desa kepada pengelolaan wisata jai-jai raok tersebut untuk melakukan segala bentuk kegiatan. Peran pemerintah Desa dalam melakukan petunjuk pengelolaan wisata jai-jai raok diantaranya membantu membentuk pengurus pengelolaan wisata jai- jai raok yang telah berada di dalam BUMDes, menyediakan insfratraktur (tidak hanya bentuk fisik), namun pada saat ini dari kondisi yang kita lihat bersama- sama bahwa penyediaan infrasutuktur secara fisiknya sedang tidak mendapatkan perawatan yang baik, memperluas berbagai fasilitas, kegiatan koordinasi anantara aparatur pemerintah dengan wisata, pengaturan dan promosi umum ke luar desa, kecamatan bahkan kabupaten.

3. Peran Pasif Pemerintah Desa

Sedangkan peran pasif adalah dimana pemerintah desa dapat memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok dapat berjakan dengan baik dengan melakukan kebebasan dan melakukan evaluasi dalam pengelolaan sektor wisata jai-jai raok Desa Padang Tanggung Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantang Singingi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Kepala Desa Padang Tanggung Bapak M. Tamrin pada Tanggal 12 April 2022, mengenai Apakah Pemerintah Desa Memberikan Dan Serta Melakukan Kebebasan Kepada Masyarakat Dalam Pengelolaan Wisata Jai Jai Raok serta Apakah Pemerintah Desa Telah Ada Melakukan Evaluasi Terhadap Pengelolaan Wisata Jai Jai Raok , beliau menjawab bahwasannya :

“Pemerintah desa memberikan serta melakukan kebebasan kepada masyarakat dalam pengelolaan wisata jai jai raok ini dengan cara memberikan ruang ataupun lapangan pekerjaan untuk membuka peluang kerja demi meningkatkan ekonomi masyarakat dalam wisata jai jai raok ini. Ada, Pemerintah desa melakukan evaluasi 1/3 bulan. 1/3 bulan ini wajib melakukan evaluasi dalam pengelolaan wisata jai jai raok ini baik dalam keuangan ataupun kendala yang ditemui dalam proses pengelolaan ataupun pengembangan jai jai raok ini”. (Kepala Desa Padang Tanggung Bapak M. Tamrin pada Tanggal 12 April 2022)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Sekretaris Desa Padang Tanggung Bapak Abd. Rahman, pada tanggal 12 April 2022, terkait Apakah Pemerintah Desa Memberikan Dan Serta Melakukan Kebebasan Kepada Masyarakat Dalam Pengelolaan Wisata Jai Jai Raok serta Apakah Pemerintah Desa Telah Ada Melakukan Evaluasi Terhadap Pengelolaan Wisata Jai Jai Raok, beliau menjawab bahwasannya :

“Peran aktif pemerintahan desa dalam memberikan pengawasa terhadap pengelolaan wisata jai jai raok adalah dengan memberikan dukungan dan kerjasamaa terhadap pengelolaan wisata tersebut,dan tak lupa pula untuk memberikan masukan atau arahan terhadap pengelolaan wisata jai jai raok tersebut. Sudah ada nya peran pemerintahan desa dalam membwrikan petunjuk ataupun arahan dalam pengelolaan wisata jai jai raok tersebut dengan memberikan laporan dan dukungan yang dilakukan oleh badan pemerintahan desa dan perivikasi terhadap segala kegiatan yang dilakukan”. (Sekretaris Desa Padang Tanggung Bapak Abd. Rahman, pada tanggal 12 April 2022)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan penjaga ataupun Pengelola Objek Wisata Jai-Jai Raok Desa Padang Tanggung Kepada Ibu Siska Leona Pada 12 April 2022, terkait Apakah Pemerintah Desa Memberikan Dan Serta Melakukan Kebebasan Kepada Masyarakat Dalam Pengelolaan Wisata Jai Jai Raok serta Apakah Pemerintah Desa Telah Ada Melakukan Evaluasi Terhadap Pengelolaan Wisata Jai Jai Raok , beliau menjawab bahwasannya :

“Pemeritah desa memberikan erta melakukan kebebasan terhadap masyarakat dalam pengelolaan wistaa jai-jai raok ini dengan cara memberikan peluang usaha terhadap masyarakat yang mana masyarakat diperbolehkan untuk berjualan disekitaran tempat wisata jaijai raok ini. dan aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka. Transparasi dalam pengelolaan wisata ini sangat perlu mengingat wisata jaijai raok ini bertempat dipedesaaan dimana nilainilai yang harus dikembangkan adalah kejujuran dan keterbukaan. Ada, Pemerintah desa melakukan evaluasi terhadap pengelolaan wisata jaijai raok ini yang mana dilakukan sebulan sekali baik itu dalam masalah kemajuan ataupun perkembangan wisata jaijai raok ini ataupun masalah pemasukan perhari ataupun untung dan rugi dalam pengembangan dan pengelolaan wisata tersebut”. (Pengelola Objek Wisata Jai-Jai Raok Desa PadangTanggung Kepada Ibu Siska Leona Pada 12 April 2022)

Dalam wawancara yang dilakukan penulis melakukan wawancara dengan Pengunjung Objek Wisata Jai-Jai Raok Ibu Poni Putri Pada 12 April 2022, terkait Apakah Pemerintah Desa Memberikan Dan Serta Melakukan Kebebasan Kepada Masyarakat Dalam Pengelolaan Wisata Jai Jai Raok serta Apakah Pemerintah Desa

Telah Ada Melakukan Evaluasi Terhadap Pengelolaan Wisata Jai Jai Raok , beliau menjawab bahwasannya :

“Sepengetahuan saya pemdes memberikan kebebasan kepada masyarakat setempat dalam pengelolaan wisata jai-jai raok dengan syarat mematuhi peraturan yang di tetapkan bersama dan tidak melanggar hal-hal yang dilarang, serta selalu di bawah pengawasan pemdes dan BUMDes. Pasti pemdes telah melakukan evaluasi terhadap pengelolaan wisata jai-jai raok. Karena yang saya ketahui sampai saat ini wisata jai-jai raok masih berjalan, tidak mungkin suatu wisata tetap berjalan dengan baik tanpa adanya evaluasi. Dengan adanya evaluasi, semua yang dilakukan diharapkan bisa sesuai rencana awal. Mungkin pemdes juga berharap dengan dilakukannya evaluasi maka mereka akan bisa merencanakan bagaimana wisata jai-jai raok ini kedepannya demi kemajuan wisata serta masyarakat setempat”. (Pengunjung Objek Wisata Jai-Jai Raok Ibu Poni Putri Pada 12 April 2022)

Dapat disimpulkan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Key Informan dan Informan mengenai Apakah Pemerintah Desa Memberikan Dan Serta Melakukan Kebebasan Kepada Masyarakat Dalam Pengelolaan Wisata Jai Jai Raok serta Apakah Pemerintah Desa Telah Ada Melakukan Evaluasi Terhadap Pengelolaan Wisata Jai Jai Raok bahwasannya peran aktif pemerintahan desa dalam memberikan pengawasan terhadap pengelolaan wisata jai-jai raok adalah dengan memberikan dukungan dan kerjasama terhadap pengelolaan wisata tersebut, dan tak lupa pula untuk memberikan masukan atau arahan terhadap pengelolaan wisata jai jai raok tersebut. Pemerintah desa juga telah melakukan evaluasi terhadap pengelolaan wisata jai-jai raok ini yang mana dilakukan sebulan sekali baik itu dalam masalah kemajuan ataupun perkembangan wisata jai-jai raok ini. Evaluasi yang dilakukan sebulan sekali tersebut tidak menunjukka pengembangan pembangunan ataupun perawatan terhadap objek wisata jai-jai raok.

C. Faktor Penghambat Pembahasan Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Wisata Jai- Jai Raok Desa Padang Tanggung Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan bahwasannya ada beberapa hambatan yang terjadi dalam Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Wisata Jai- Jai Raok Desa Padang Tanggung Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi sebagai berikut :

1. Peran aktif pemerintahan desa dalam memberikan pengawasa terhadap pengelolaan wisata jai-jai raok masukan atau arahan seperti apa yang telah diberikan pemerintah desa terhadap pengelolaan objek wisatanya. Selanjutnya kerjasama yang telah di lakukan pemerintah desa dengan objek wisata pun tidak tahu dalam bentuk apa. Selain hanya menjelaskan bahwa objek wisata jai-jai raok ini merupakan bagian dar BUMDes yang ada di Desa Padang Tanggung.
2. Peran Partisipatif Pemerintah Desa dalam melakukan petunjuk pengelolaan wisata jai-jai raok diantaranya membantu membentuk pengurus pengelolaan wisata jai-jai raok yang telah berada di dalam BUMDes, menyediakan insfratraktur (tidak hanya bentuk fisik), namun pada saat ini dari kondisi yang kita lihat bersama-sama bahwa penyediaan infrasutuktur secara fisiknya sedang tidak mendapatkan perawatan yang baik, memperluas berbagai fasilitas, kegiatan koordinasi antara aparatur pemerintah dengan wisata, pengaturan dan promosi umum ke luar desa, kecamatan bahkan kabupaten.

3. Peran Pasif Pemerintah Desa pengelolaan wisata jai-jai raok hanya dilakukan sebulan sekali baik itu dalam masalah kemajuan ataupun perkembangan wisata jai-jai raok ini ataupun masalah pemasukan perhari ataupun untung dan rugi dalam pengembangan dan pengelolaan wisata tersebut. Evaluasi yang dilakukan sebulan sekali tersebut tidak menunjukkan pengembangan pembangunan ataupun perawatan terhadap objek wisata jai-jai raok.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat di tarik kesimpulan berdasarkan indikator penelitian sebagai berikut :

1. Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Sektor Wisata Jai- Jai Raok Desa Padang Tanggung Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi belum dikelola secara baik dan tidak adanya inisiator perubahan baik dari pemerintah desa maupun Swadaya masyarakat ditandai dengan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kerjasama dalam pengelolaan objekwisata. Serta kurangnya daya tarik terhadap objek wisata ini sendiri karenakurangnya pembangunan ataupun pengembangan.
2. Faktor penghambat pengelolaan wisata Jai- jai raok Desa Padang Tanggung adalah kerjasama yang telah di lakukan pemerintah desa dengan objek wisata pun tidak tahu dalam bentuk apa. Pemerintah Desa dalam melakukan petunjuk pengelolaan wisata jai-jai raok diantaranya hanyamenyediakan insfratraktur (tidak hanya bentuk fisik), namun tidak dilakukan pengelolaan berkelanjutan ataupun perawatan infrastruktur serta, Pemerintah Desa dalam pengelolaan wisata jai-jai raok hanya dilakukan sebulan sekali baik itu dalam masalah kemajuan ataupun perkembangan wisata jai-jai raok.

6.2 Saran

Dari kesimpulan yang telah dijabarkan oleh penulis teliti maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa dapat lebih menjelaskan bahwasannya arahnya seperti apa yang telah diberikan pemerintah desa terhadap pengelolaan objek wisatanya.
2. Dalam hal penyediaan infrasutuktur secara fisiknya yang sedang tidak mendapatkan perawatan yang baik, agar dilakukan evaluasi secara seksama dengan pengelola objek wisata sehingga objek wisata dapat melakukan promosi umum ke luar desa, kecamatan bahkan kabupaten
3. Mengoptimalkan kerjasama antara Pemerintah Desa dan Pengelola objek wisata ataupun dengan masyarakat setempat agar objek wisata lebih baik kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abu Ahmadi(1982), Psikologi Sosial, (Surabaya: PT Bina Ilmu)
- Creswell, J. (2016). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan*.
- Ilmar A. 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Kencana. Jakarta: Media Baru.
- Moleong, L. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung: Remaja Rosda Karya Offset.
- Napitupulu, Paiman. 2012. *Pelayanan Publik & Customer Satisfaction*. Cetakan Ke 2. Bandung: P.T. Alumni
- Ndraha, T. (2011). *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Osborne, G. T. and D. (2000). *Mewirousahakan Birokrasi*. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.
- Rukayat, Y. (2021). *Manajemen Pemerintahan Desa & Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta: Bee Media Pustaka.
- Soerjono Soekanto, 2009, *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru*,Rajawali Pers: Jakarta.
- Sri, M. (2014). *Pelayanan Publik, Pelayanan Administrasi Terpadu*. Bandung: Indra Prahasta.
- Suprpto, T. (2009). *Pengantar Teori & Manajemen Komunikasi*. Yogyakarta: Medpress Bandung : PT. Refika Aditama

Sri Sudaryatmi, Sukirno, Sri Kartini. 2000. *Beberapa Aspek Hukum Adat*.
Semarang: Badan Penerbit Undip.

Sutarjo. (2011). *Pembangunan Desa Dari Bawah Dan Partisipasi Masyarakat*.

Syafiie. (2005). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.

Syafiie, I. (2016). *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Terry. (2009). *Pengelolaan (Management) Merupakan Sebuah Proses Khas Yang Terdiri Dari Sebuah Tindakan Tindakan*.

Warpani. (2007). *pariwisata dalam tata ruang wilayah*. Bandung: ITB Bandung.

Widjaja. (2014). *Pemerintahan Desa/ Marga*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Yoeti. (2001). *Pengantar Ilmu Priwisata*. Bandung: Angkasa. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Munaf, Y. (2016). *Hukum Administrasi Negara. Marpoyan Tujuh, Pekanbaru*.

Jurnal

Ihsan, A. N., & Setiyono, B. (2018). Analisis Pengelolaan Pemerintah Desa (Pemerintah Desa) Gerbang Lentera Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep. *Journal of Politic and Government Studies*, 7(04), 221-230.

Nugrahaningsih, P., & Muttaqin, H. (2018). Optimalisasi Peran PEMERINTAH DESA Desa Bulusulur Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri Dalam Membangun Desa Wisata. *Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan Corporate Social Responsibility(PKM-CSR)*, 1, 1532-1545.

Sagita, G. L., Mutimatun, N. A., & SH, M. (2017). *Peran Pemerintah Desa (Pemerintah Desa) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa*

Berdasarkan Uu No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus di Pemerintah Desa Tirta Mandiri Klaten) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Setiawan, I. A. T. (2017). *Peran Pemerintah Desa dalam pengelolaan wisata air desa Pongok kabupaten Klaten Jawa Tengah.*

Setyaningsih, A. (2021). *Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Desa Wisata Berupa Pantai Pidakan Dan Watubale Di Desa Jetak, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan* (Doctoral)

Sumiasih, K. (2018). *Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata (Studi di Desa Pakse Bali, Kabupaten Klungkung). Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 7(4), 565-585.*

Eet Saeful Hidayat, dkk. 2020 *Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Objek Wisata Curug Kembar Desa Raksabaya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh Jln. R.E. Martadinata No. 150 Ciamis. Vol 7 No.2*

Regulasi

Undang-Undang Kepariwisata No 10 Tahun 2009

UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

UU No 6 tahun 2014 Tentang Desa